



Optimalisasi Pemanfaatan Pengelolaan BMD

PONTIANAK- Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Mohammad Bari menghadiri acara Diseminasi Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota Se- Kalimantan Barat di Ballroom Hotel Golden Tulip Pontianak, Kamis (31/10).

Pada kesempatan tersebut Bari menjelaskan bahwa dirinya sudah hampir sepuluh tahun dalam mengurus aset. "Begitu juga dengan Bapak/Ibu sekalian tentunya begitu banyak paradigma, risiko dan permasalahan yang dialami," katanya.

Dia meminta agar para pengurus aset ini harus dihargai, tidak seperti dulu dimana yang mengurus aset agak sedikit terabaikan dan berkinerja rendah. "Saya meminta agar adanya penghargaan untuk pengurus aset," tegas

Bari.

Ia juga menyebutkan, kadangkala pengurus aset kurang memiliki pengetahuan, sehingga saat melihat data laporan keuangan suatu daerah ada yang membengkak nilai asetnya.

"Hal ini dikarenakan misinformasi yang mana dalam pengelolaan aset yang membeli (pengadaan) orang lain dan yang mencatat juga orang lain dan yang melaporkan juga orang lain dan risiko yang mengelola lebih besar," tukasnya.

Dirinya menegaskan bahwa ketika berbicara tentang optimalisasi aset, harus dilakukan identifikasi yang matang. "Jadi setelah diidentifikasi, kemudian selanjutnya dilakukan penilaian terhadap aset BMD tersebut", tuturnya.

Kemudian, ia juga meminta kemudahan untuk legalisasi pe-

optimalisasi pengelolaan BMD ini kita betul-betul dapat mengeluarkan ide-ide dan silakan bertanya dengan narasumber - narasumber yang ahli ini dari DJKN tentang bagaimana kita memperlakukan aset sehingga menjadi lebih baik," ujarnya.

Di tempat yang sama, Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Barat Tetik Fajar Ruwandari menjelaskan bahwa saat ini ada tujuh pejabat fungsional penilai di beberapa Kabupaten di Kalimantan Barat yakni satu pejabat fungsional penilai di Kabupaten Ketapang, satu pejabat fungsional penilai Kabupaten Melawi dan satu pejabat fungsional penilai Kabupaten Kubu Raya. Kami sudah memberikan izin ke pemerintah daerah Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Ketapang terkait pejabat fungsional penata pelaksana barang," katanya. (mse/r)



BIRO ADPIM KALBAR

BMD: Mohammad Bari menghadiri acara Diseminasi Optimalisasi Pengelolaan BMD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota Se- Kalimantan Barat.

nilai pemerintah daerah yang selama ini telah dilakukan kerja sama dengan Direktorat Jenderal

Kekayaan Negara (DJKN).

"Jadi, saya berharap ke depannya, Pemda juga bisa diberikan

wewenang untuk melakukan penilaian suatu aset. Saya berharap dengan adanya diseminasi